

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI BERUPA GANTI RUGI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)

Oleh:

HERICA PURNAMA SYAFITRI

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penyelesaian perkara hukum dengan *Restorative Justice* dikenal istilah Diversi. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi dilakukan pada suatu kasus yang mana pelakunya masih seorang anak atau berusia kurang dari 18 Tahun pada saat kasus tersebut terjadi. Pada proses penerapan diversi akan dihasilkan kesepakatan yang wajib disetujui oleh korban dan pelaku. Salah satunya adalah pertanggungjawaban ganti rugi. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ganti rugi dalam diversi seringkali tidak terlaksana dengan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya baik faktor internal maupun eksternal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dan Yuridis-Empiris (*Empirical Legal Research*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak, pelaksanaan diversi berdampak langsung pada bagaimana tanggung jawab ganti rugi dipenuhi oleh anak pelaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, selama anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dinilai kurang optimal berdasarkan beberapa

Herica Purnama Syafitri

faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, faktor yang penghambat diversi dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam faktor internal yang dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara oleh anak, serta faktor hukum itu sendiri.

Saran dari penelitian ini upaya penerapan diversi dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi hendaknya memiliki sanksi tegas yang dapat diterapkan bagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut, sehingga dengan demikian akan mencegah terjadinya ingkar terhadap pemenuhan atas hasil kesepakatan diversi. Serta aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi agar menjamin tidak adanya tindakan pelanggaran asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia yang disebabkan oleh penyalahgunaan dan pelanggaran kesepakatan diversi yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peradilan anak demi menjaga kemerdekaan hidup seorang anak.

Kata Kunci: Diversi, Pencurian, Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGREEMENT RESULTS IN THE FORM OF COMPENSATION IN JUVENILE THEFT CASES (A Case Study at Cilegon City Police Department)

By

HERICA PURNAMA SYAFITRI

The criminal act of theft committed by a child is a complex issue that requires special handling within the juvenile justice system. In resolving legal cases through Restorative Justice, the term Diversion is commonly used. Diversion is a process of settling criminal cases in which the offender is a child. Diversion is applied in cases where the offender is still a child or under 18 years of age at the time the case occurred. During the diversion process, an agreement is reached that must be approved by both the victim and the offender. One of the agreements involves accountability in the form of compensation. However, in practice, the implementation of compensation accountability in diversion often fails to be realized due to several factors, both internal and external.

The types of problem approaches used in this research are Juridical-Normative and Juridical-Empirical (Empirical Legal Research). The data utilized consist of primary and secondary data. The study conducted in this research includes both library research and field research. The data analysis method employed is qualitative analysis.

Based on the research findings and discussion, it is shown that: This study indicates that in cases of theft committed by children, the implementation of diversion directly affects how the child offender fulfills the responsibility for compensation. According to Article 6 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion can be carried out at the stages of investigation, prosecution, and examination in the district court, provided that the child commits a criminal act punishable by imprisonment of less than seven (7) years and it is not a repeated offense. However, the implementation of the diversion agreement results

Herica Purnama Syafitri

is considered less than optimal due to several influencing factors. Based on field observations, the obstacles to diversion can be categorized into internal factors influenced by law enforcement officers involved in handling juvenile cases, as well as legal factors themselves.

The recommendation from this study is that the implementation of diversion regarding compensation accountability should include strict sanctions that can be applied for violations of the agreement. This would help prevent breaches in fulfilling the terms of the diversion agreement. Furthermore, law enforcement officers should enhance the quality of supervision in the implementation of diversion agreements to ensure that no violations of the legal principles applicable in Indonesia occur due to misuse or breach of the agreed diversion terms by both parties. This aims to prevent juvenile trials in order to protect the freedom and well-being of the child.

Keywords: Juvenile Theft, Diversion, Compensation Accountability